

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten Bandung

JAM
14, 3

Diterima, Agustus 2016
Direvisi, September 2016
Disetujui, September 2016

Ivan Gumilar SP

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama

Abstract: Regional retribution, as well as regional taxes is one of the regional revenue is expected to be one source of financing governance and regional development, to improve and equalize the welfare of the society. So, this study was conducted to determine the effectiveness and contribution of charges for services to regional revenue Bandung District in 2010-2013. The results showed that many types of the retribution of charges for services that are less effective and did not contribute to PAD Bandung District. Including retribution of flats, rental of regional government's land use, recreation areas, sport areas, and the sale of the production business. While the types of the retribution of charges for services which contribute only rental of heavy equipment from the department of Bina Marga and station services.

Keywords: retribution business services, the effectiveness, contribution

Abstrak: Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Maka penelitian ini ingin mengetahui efektivitas dan kontribusi retribusi jasa usaha terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Bandung tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil analisis masih banyak jenis retribusi jasa usaha yang kurang memberikan kontribusi dan tidak efektif terhadap PAD kabupaten Bandung. Diantaranya retribusi rumah susun, sewa pemakaian tanah pemerintah daerah dan tempat rekreasi dan olahraga serta penjualan produksi usaha. Sedangkan jenis retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi hanya sewa alat berat dari dinas Bina Marga dan Jasa terminal.

Kata Kunci: retribusi jasa usaha, efektivitas, kontribusi



Jurnal Aplikasi
Manajemen (JAM)
Vol 14 No 3, 2016
Terindeks dalam
Google Scholar

Alamat Korespondensi:
Ivan Gumilar SP, Fakultas
Bisnis dan Manajemen Uni-
versitas Widyatama, DOI:
[http://dx.doi.org/10.18202/
jam23026332.14.3.03](http://dx.doi.org/10.18202/jam23026332.14.3.03)

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah di mana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana terakhir diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan-perubahan kebijakan pengaturan

pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal

yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan efektif bila tidak didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang baik. Dengan demikian, keuangan daerah merupakan elemen penting dalam aktivitas roda pemerintahan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana sumber-sumber penerimaannya berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini akan diuraikan dasar-dasar konseptual jenis-jenis penerimaan daerah yang difokuskan pada kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010-2013.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan masukan terhadap perbaikan strategi peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung terutama yang berasal retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.

Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Objek Retribusi Daerah

Objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.

Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Tingkat pengenaaan Retribusi

Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat, bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian, penerapan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan golongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, Adrian (2008).

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau.
 - 2) Pelayanan pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaan/Villa
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - 10) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah kajian yang dimaksudkan untuk menjelaskan setiap variabel penelitian. Dari hubungan variabel tersebut dapat diperoleh rekomendasi-rekomendasi yang terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber dan Analisis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-data yang sudah terdokumentasikan. Data tersebut diperoleh dari Bagian PAD kabupaten Bandung dan sumber lainnya. Data runtun waktu (*series*) dibutuhkan untuk melihat perkembangan beberapa variabel yaitu tentang pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan untuk melihat hubungan antar variabel digunakan data *cross section*. Data yang telah dihimpun ditabulasi yang akan digunakan sebagai bahan analisis, dan dihitung untuk menentukan efektivitas dan efisiensi serta mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan retribusi jasa usaha, serta upaya untuk meningkatkannya.

Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas menurut Ulum (2008) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome (hasil) dengan output (target). Rumus efektivitas retribusi daerah adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Nurlan (2006)

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90 % - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Nurlan (2006)

Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut Halim (2004) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah

adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumus menghitung kontribusi retribusi daerah adalah sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD

QY : Realisasi PAD

QX : Realisasi retribusi daerah

N : Tahun (Periode tertentu)

Tabel 2. Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Presentasi Kontribusi Retribusi Daerah	Kriteria
= 50	Sangat Baik
41 – 50	Baik
31 – 40	Sedang
21 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
= 10	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada periode 2010-2013 memiliki rata-rata pertahun sebesar 15.62% yang berarti masih kurang memberikan kontribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih harus berusaha untuk memperbaiki kinerja dan sistem pada pemungutan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Efektivitas penerimaan Jasa usaha dilihat dari periode 2010-2013 dapat dikatakan efektif jika dilihat dari tabel 5 memiliki rata-rata pertahun sebesar 91.20%. Hal ini merupakan kemajuan pemerintah dalam melakukan pemugutan retribusi jasa usaha di tahun 2013.

Sementara untuk kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha ini masih sangat kurang terhadap pendapatan retribusi daerah rata-rata kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha pertahun adalah sebesar 5,81%, Penerimaan retribusi ini seharusnya dapat ditingkatkan walaupun banyak sekali indikator yang menjadikan pemerintah merasa kesulitan dalam memaksimalkan pendataan potensi sumber retribusi jasa usaha yang berpotensi.

Efektivitas penerimaan pemakaian kekayaan daerah dilihat dari periode 2010-2013 dapat dikatakan cukup efektif memiliki rata-rata pertahun sebesar 92.09%. Hal ini merupakan kemajuan pemerintah

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	51,154,544,409.00	60,254,329,366.00	117.79	Sangat Efektif
2011	32,589,001,964.00	32,791,380,684.00	100.62	Sangat Efektif
2012	39,518,426,609.00	41,045,068,255.00	103.86	Sangat Efektif
2013	51,214,186,650.00	49,547,220,662.00	96.75	Efektif
Rata-rata Per Tahun			104.78	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tingkat efektivitas retribusi daerah selama kurun waktu 2010-2013 berkisar antara 90% dan Lebih dari 100% artinya upaya pencapaian realisasi penerimaan sangat efektif sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat sangat baik, sehingga dapat disimpulkan sangat efektif. Dalam hal ini maka rata-rata pertahun penerimaan retribusi daerah selama empat tahun dapat dikatakan sangat efektif.

dalam melakukan pemugutan retribusi pemakaian kekayaan bersih di tahun 2013.

Kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan retribusi jasa usaha pada periode 2010-2013 memiliki rata-rata pertahun sebesar 31.48% yang berarti sedang memberikan kontribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih

Tabel 4. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	60,254,329,366.00	199,240,708,309.00	30.24	Sedang
2011	32,791,380,684.00	291,079,862,460.00	11.27	Kurang
2012	41,045,068,255.00	366,316,900,578.00	11.20	Kurang
2013	49,547,220,662.00	507,894,913,851.00	9.76	Sangat Kurang
Rata-rata Per Tahun			15.62	Kurang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	2,501,180,000.00	1,707,201,202.00	68.26	Kurang Efektif
2011	1,910,080,000.00	1,866,534,430.00	97.72	Efektif
2012	2,766,438,600.00	2,692,714,000.00	97.34	Efektif
2013	3,998,252,300.00	4,058,263,500.00	101.50	Sangat Efektif
Rata-rata Per Tahun			91.20	Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 6. Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	1,707,201,202.00	60,254,329,366.00	2.83	Sangat Kurang
2011	1,866,534,430.00	32,791,380,684.00	5.69	Sangat Kurang
2012	2,692,714,000.00	41,045,068,255.00	6.56	Sangat Kurang
2013	4,058,263,500.00	49,547,220,662.00	8.19	Sangat Kurang
Rata-rata Per Tahun			5.81	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 7. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	750,180,000.00	616,509,452.00	82.18	Cukup Efektif
2011	715,080,000.00	679,657,930.00	95.05	Efektif
2012	845,175,000.00	801,178,000.00	94.79	Efektif
2013	996,558,800.00	960,120,000.00	96.34	Efektif
Rata-rata Per Tahun			92.09	Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 8. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	616,509,452.00	1,707,201,202.00	36.11	Sedang
2011	679,657,930.00	1,866,534,430.00	36.41	Sedang
2012	801,178,000.00	2,692,714,000.00	29.75	Cukup
2013	960,120,000.00	4,058,263,500.00	23.66	Cukup
Rata-rata Per Tahun			31.48	Sedang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

harus berusaha untuk memperbaiki kinerja dan sistem pada pemungutan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

retribusi Rumah Susun kembali memberikan hasil yang baik.

Sementara untuk kontribusi penerimaan Rumah Susun ini masih dikatakan kurang berkontribusi

Tabel 9. Efektivitas Penerimaan Retribusi Penerimaan Retribusi Rumah Susun Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	150,000,000.00	50,940,000.00	33.96	Tidak Efektif
2011	114,000,000.00	93,860,000.00	82.33	Cukup Efektif
2012	211,536,000.00	147,230,000.00	69.60	Kurang Efektif
2013	200,000,000.00	163,310,000.00	81.66	Cukup Efektif
Rata-rata Per Tahun			66.8	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Efektivitas penerimaan Retribusi Rumah Susun dapat dikatakan tidak efektif memiliki rata-rata per tahun sebesar 66.8%. tetapi tahun 2013 penerimaan

terhadap pendapatan retribusi daerah, Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi rumah susun pertahun adalah sebesar 16,40% dengan kesimpulan kurang berkontribusi.

Tabel 10. Kontribusi Penerimaan Retribusi Penerimaan Retribusi Rumah Susun Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	50.940.000,00	616.509.452,00	8.26	Sangat Kurang
2011	93.860.000,00	679.657.930,00	13.81	Kurang
2012	147.230.000,00	801.178.000,00	18.38	Kurang
2013	163.310.000,00	960.120.000,00	17.01	Kurang
Rata-rata Per Tahun			14.37	Kurang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 11. Efektivitas Penerimaan Retribusi Sewa Alat Berat dari Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	305,000,000.00	305,220,000.00	100.07	Sangat Efektif
2011	305,000,000.00	306,955,000.00	100.64	Sangat Efektif
2012	345,000,000.00	357,715,000.00	103.69	Sangat Efektif
2013	401,500,000.00	427,940,000.00	106.59	Sangat Efektif
Rata-rata Per Tahun			102.74	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Efektivitas penerimaan Sewa Alat Berat dari Dinas Bina Marga dikatakan sangat efektif memiliki rata-rata pertahun sebesar 102,74%. Hal ini merupakan kemajuan pemerintah daerah dalam melakukan pemugutan retribusi Sewa Alat Berat dari Dinas Bina Marga di tahun 2013.

daerah, Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi Sewa alat berat dari bina marga pertahun adalah sebesar 45.97% dengan kesimpulan baik dalam berkontribusi.

Tabel 12. Kontribusi Penerimaan Retribusi Sewa Alat Berat dari Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	305.220.000,00	616.509.452,00	49.51	Baik
2011	306.955.000,00	679.657.930,00	45.16	Baik
2012	357.715.000,00	801.178.000,00	44.65	Baik
2013	427.940.000,00	960.120.000,00	44.57	Baik
Rata-rata Per Tahun			45.97	Baik

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Sementara untuk kontribusi penerimaan Sewa Alat Berat dari Dinas Bina Marga ini sudah baik terhadap pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan

Efektivitas retribusi Sewa Alat-alat Berat Kecamatan dapat dikatakan efektif memiliki rata-rata per tahun sebesar 91.94%. Perkembangan setiap tahun memberikan gambaran peningkatan penerimaan pada periode 2010-2013.

Tabel 13. Efektivitas Penerimaan Retribusi Sewa Alat-alat Berat Kecamatan Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	150,180,000.00	115,335,000.00	76.80	Kurang Efektif
2011	151,080,000.00	133,382,000.00	88.29	Cukup Efektif
2012	143,639,000.00	148,738,000.00	103.55	Sangat Efektif
2013	219,058,800.00	217,180,000.00	99.14	Efektif
Rata-rata Per Tahun			91.94	Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 14. Kontribusi Penerimaan Retribusi Sewa Alat-alat Berat Kecamatan Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	115.335.000,00	616.509.452,00	18,71	Kurang
2011	133.382.000,00	679.657.930,00	19,62	Kurang
2012	148.738.000,00	801.178.000,00	18,56	Kurang
2013	217.180.000,00	960.120.000,00	22,62	Cukup
Rata-rata Per Tahun			19.87	Kurang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Untuk kontribusi penerimaan Sewa Alat-alat Berat Kecamatan ini cukup memberikan kontribusi terhadap pendapatan retribusi Pemakaian kekayaan daerah, Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi Sewa Alat-alat Berat Kecamatan pertahun adalah sebesar 19.87% dengan kesimpulan kurang berkontribusi.

Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi Sewa laboratorium pertahun adalah sebesar 17,44% dengan kesimpulan kurang berkontribusi. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi Sewa laboratorium.

Tabel 15. Efektivitas Penerimaan Retribusi Sewa Laboratorium

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	115,000,000.00	115,005,000.00	100.00	Sangat Efektif
2011	115,000,000.00	115,000,000.00	100.00	Efektif
2012	145,000,000.00	147,495,000.00	101.72	Sangat Efektif
2013	137,500,000.00	151,690,000.00	110.32	Sangat Efektif
Rata-rata Per Tahun			103.01	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Efektivitas penerimaan Retribusi Sewa Laboratorium dikatakan sangat efektif memiliki rata-rata pertahun sebesar 103.01%. Hal ini merupakan kemajuan pemerintah daerah dalam melakukan pemugutan retribusi Sewa Sewa Laboratorium di tahun 2013.

Efektivitas penerimaan Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemda (Dinas Bina Marga) dikatakan sangat tidak efektif memiliki rata-rata pertahun sebesar 50.39%.

Tabel 16. Kontribusi Penerimaan Retribusi Sewa Laboratorium

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	115.005.000,00	616.509.452,00	18,65	Kurang
2011	115.000.000,00	679.657.930,00	16,92	Kurang
2012	147.495.000,00	801.178.000,00	18,41	Kurang
2013	151.690.000,00	960.120.000,00	15,80	Kurang
Rata-rata Per Tahun			17,44	Kurang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 17. Efektivitas Penerimaan Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemda (Dinas Bina Marga) Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	30,000,000.00	30,009,452.00	100.03	Sangat Efektif
2011	30,000,000.00	30,460,930.00	101.54	Sangat Efektif
2012	0.00	0.00	0.00	Tidak Efektif
2013	38,500,000.00	0.00	0.00	Tidak Efektif
Rata-rata Per Tahun			50.39	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 18. Kontribusi Penerimaan Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemda (Dinas Bina Marga) Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	30.009.452,00	616.509.452,00	4,87	Sangat Kurang
2011	30.460.930,00	679.657.930,00	4,48	Sangat Kurang
2012	0,00	801.178.000,00	0,00	Sangat Kurang
2013	0,00	960.120.000,00	0,00	Sangat Kurang
Rata-rata Per Tahun			2.34	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemda (Dinas Bina Marga) pertahun adalah sebesar 2.34% dengan kesimpulan sangat kurang berkontribusi.

Kontribusi retribusi jasa terminal terhadap pendapatan retribusi jasa usaha memiliki rata-rata per tahun sebesar 46.66% yang berarti memberikan kontribusi yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Tabel 19. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Terminal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	1,500,000,000.00	878,495,000.00	58.57	Tidak Efektif
2011	1,000,000,000.00	1,000,045,000.00	100.00	Sangat Efektif
2012	1,108,334,000.00	1,159,811,000.00	104.64	Sangat Efektif
2013	1,463,000,000.00	1,467,128,500.00	100.28	Sangat Efektif
Rata-rata Per Tahun			90.87	Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Efektivitas retribusi jasa terminal dilihat dari periode 2010-2013 dapat dikatakan efektif memiliki rata-rata pertahun sebesar 90.87%. Perkembangan setiap tahun memberikan gambaran peningkatan penerimaan pada periode 2011-2013.

pemerintah masih harus berusaha untuk memperbaiki kinerja dan sistem pada pemungutan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan kontribusi retribusi jasa terminal terhadap retribusi jasa usaha.

Tabel 20. Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Terminal

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	878,495,000.00	1,707,201,202.00	51.46	Sangat Baik
2011	1,000,045,000.00	1,866,534,430.00	53.58	Sangat Baik
2012	1,159,811,000.00	2,692,714,000.00	43.07	Baik
2013	1,467,128,500.00	4,058,263,500.00	36.15	Sedang
Rata-rata Per Tahun			46.06	Baik

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 21. Efektivitas Penerimaan Retribusi Rumah potong Hewan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	79,163,000.00	79,163,000.00	100.00	Efektif
2011	81,000,000.00	81,031,500.00	100.04	Sangat Efektif
2012	183,600,000.00	198,700,000.00	108.22	Sangat Efektif
2013	211,440,000.00	211,660,000.00	100.10	Sangat Efektif
Rata-rata Per Tahun			102.09	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Efektivitas penerimaan Retribusi Rumah potong hewan dikatakan sangat efektif memiliki rata-rata pertahun sebesar 102.09%. Sehingga penerimaan retribusi rumah potong merupakan salah satu indikator peningkatan kinerja pemerintah.

untuk memperbaiki kinerja dan sistem pada pemungutan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap retribusi jasa usaha.

Tabel 22. Kontribusi Penerimaan Retribusi Rumah potong Hewan

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	79,163,000.00	1,707,201,202.00	4.64	Sangat Kurang
2011	81,031,500.00	1,866,534,430.00	4.34	Sangat Kurang
2012	198,700,000.00	2,692,714,000.00	7.38	Sangat Kurang
2013	211,660,000.00	4,058,263,500.00	5.22	Sangat Kurang
Rata-rata Per Tahun			5.39	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan retribusi jasa usaha memiliki rata-rata pertahun sebesar 5,39% yang berarti sangat kurang memberikan kontribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus berusaha

Efektivitas penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga dikatakan kurang efektif memiliki rata-rata pertahun sebesar 36.72%.

Tabel 23. Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	50,000,000.00	18,500,000.00	37.00	Tidak Efektif
2011	0.00	0.00	0.00	Tidak Efektif
2012	550,000,000.00	453,625,000.00	82.48	Cukup Efektif
2013	1,240,000,000.00	1,332,100,000.00	107.43	Sangat Efektif
Rata-rata Per Tahun			56.72	Kurang Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 24. Kontribusi Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	18,500,000.00	1,707,201,202.00	1.08	Sangat Kurang
2011	0.00	1,866,534,430.00	0.00	Sangat Kurang
2012	453,625,000.00	2,692,714,000.00	16.85	Kurang
2013	1,332,100,000.00	4,058,263,500.00	32.82	Sedang
Rata-rata Per Tahun			12.68	Kurang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Kontribusi retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga terhadap pendapatan retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga memiliki rata-rata pertahun sebesar 12.68% yang berarti kurang memberikan kontribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus berusaha untuk memperbaiki kinerja dan sistem pada pemungutan retribusi jasa usaha, maka dapat meningkatkan kontribusi retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga terhadap retribusi jasa usaha.

tahun sebesar 100.13%. Sehingga pada tahun 2010-2013 penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah merupakan perkembangan dan peningkatan kinerja pemerintah di tahun tersebut.

Kontribusi retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah terhadap pendapatan retribusi jasa usaha memiliki rata-rata pertahun sebesar 3.11% yang berarti sangat kurang memberikan kontribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus

Tabel 25. Efektivitas Penerimaan Retribusi Perjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2010	61,837,000.00	62,100,000.00	100.43	Sangat Efektif
2011	69,000,000.00	69,000,000.00	100.00	Efektif
2012	79,329,600.00	79,400,000.00	100.09	Sangat Efektif
2013	87,253,500.00	87,255,000.00	100.00	Sangat Efektif
Rata-rata Per Tahun			100.13	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Efektivitas penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah dilihat dari periode 2010-2013 dapat dikatakan sangat efektif memiliki rata-rata per

berusaha untuk memperbaiki kinerja dan sistem pada pemungutan retribusi jasa usaha, maka dapat meningkatkan kontribusi retribusi Produksi Usaha daerah terhadap retribusi jasa usaha di kabupaten Bandung.

Tabel 26. Kontribusi Penerimaan Retribusi Perjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2010	62,100,000.00	1,707,201,202.00	3.64	Sangat Kurang
2011	69,000,000.00	1,866,534,430.00	3.70	Sangat Kurang
2012	79,400,000.00	2,692,714,000.00	2.95	Sangat Kurang
2013	87,255,000.00	4,058,263,500.00	2.15	Sangat Kurang
Rata-rata Per Tahun			3.11	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Berdasarkan hasil analisis dari aspek efektivitas dan kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten Bandung periode tahun 2010-2013, maka dapat diketahui sumber-sumber retribusi yang potensial untuk dikembangkan bahkan dioptimalkan penerimaannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bandung. Retribusi yang memberikan efektivitas dan kontribusi tertinggi pada PAD Kabupaten Bandung adalah sewa alat berat dari dinas Binamarga dan jasa terminal sementara yang sangat tidak efektif dan tidak memberikan kontribusi yaitu retribusi rumah susun, sewa pemakaian tanah pemda dan tempat rekreasi dan olahraga. Hal ini perlu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Kab. Bandung kemungkinan besar retribusi yang kurang potensial tersebut berbenturan dengan retribusi yang ada di daerah kabupaten/kota artinya retribusi yang telah dipungut di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota kembali dipungut lagi, sehingga dari sisi penerimaannya pun tidak efektif. Sementara terjadinya peningkatan tiap tahun pada penerimaan jenis retribusi jasa usaha dikarenakan setiap tahunnya secara umum dipengaruhi oleh keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali potensi masing-masing sektor untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan bahwa retribusi jasa usaha memberikan pengaruh terhadap PAD Kabupaten Bandung pada periode 2010-2013 sangat efektif tetapi masih kurang memberikan kontribusi dibandingkan dengan sumber retribusi lainnya. Berdasarkan

hasil analisis masih banyak jenis retribusi jasa usaha yang kurang memberikan kontribusi dan tidak efektif terhadap PAD kabupaten Bandung. Diantaranya retribusi rumah susun, sewa pemakaian tanah pemda dan tempat rekreasi dan olahraga serta penjualan produksi usaha. Sedangkan jenis retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi hanya sewa alat berat dari dinas Bina Marga dan Jasa terminal.

Saran

Untuk klasifikasi jenis retribusi yang sangat potensial dan potensial dari sisi penerimaannya harus terus dioptimalkan sehingga realisasi penerimaan dari tahun ke tahun bisa lebih meningkat dan tidak perlu menambah atau mengurangi jenis retribusi yang ada. Akan tetapi, untuk jenis retribusi yang kurang potensial perlu dikaji kembali apakah retribusi tersebut masih bisa dioptimalkan atau dihapus saja karena dari sisi kontribusi maupun pertumbuhan misalnya tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap retribusi Jasa Usaha di kabupaten Bandung.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- B.F. Putra, D. Atmanto, dan N.F. Nuzula. 2014 Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) [Vol. 10 No. 1 Mei 2014.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi sektor publik*. Malang: UMM Press.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [Online]. From: <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-undang/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-4893> [24 Desember 2015].

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [Online].From:[http://](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDER)

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDER/DOKUMEN/uu28-2009.pdf [24 Desember 2015].

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. [Online].From:<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c4fdc432308f/node/19787> [24 Desember 2015].